OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM REVITALISASI PEMASYARAKATAN (*Optimization of the implementation Task of Correctional Adviser in A Correctional Revitalization*)

Dwi Elyana Susanti
Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan
Kementerian Hukum dan HAM R.I, Jakarta
elsus33@gmail.com

Tulisan Diterima: 14-01-2020; Direvisi: 22-01-2020; Disetujui Diterbitkan: 09-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>

ABSTRAK

Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan jabatan fungsional berperan pada seluruh tahapan proses hukum. Pola pembinaan yang dilakukan pada warga binaan pemasyarakatan ditentukan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam merevitalisasi Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan struktur organisasi Balai Pemasyarakatan belum ada kotak Jabatan Fungsional Pemasyarakatan. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus seperti pembinaan pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, kedudukan dalam struktur organisasi, kompetensi, dan objektivitas pemberian tugas dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan. Begitu pentingnya pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan harus didukung dengan kejelasan kedudukannya di Balai Pemasyarakatan dengan melengkapi struktur jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan serta menyederhanakan struktur organisasi, serta perlu segera membangun Balai Pemasyarakatan di kabupaten/kota.

kata kunci: pembimbing kemasyarakatan; pelaksanaan tugas; revitalisasi.

ABSTRACT

Correctional Adviser, which is a functional position, plays a role at all stages of the legal process. The pattern of coaching conducted on correctional fostered residents is determined from the results of research community counselors. This study uses a normative legal approach to explain various applicable laws and regulations relating to the Implementation of Community Guidance duties in revitalizing Correctional Facilities. The results showed the organizational structure of the Penitentiary did not yet have a Correctional Functional Position box. The Functional Position of Community Guidance requires special attention such as the fostering of functional functions of Community Guidance, position in the organizational structure, competence, and objectivity of assignment in support of penal revitalization. Once the importance of carrying out the duties of the Community Guidance must be supported by clarity of his position in the Penitentiary by completing the functional structure of the Community Guidance and simplifying the organizational structure, and the need to immediately establish a Penitentiary in the district /city.

Keyword: correctional adviser; implementation task; revitalization.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial. Sistem Peradilan pidana dilaksanakan mulai dari kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.¹

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan atau sub-sub sistem peradilan pidana. Keberadaan BAPAS tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. BAPAS merupakan bagian dari sistem tata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.²

Dalam penanganan terhadap anak, peran BAPAS sendiri mulai terlihat jelas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Pidana Anak yang

mengatur petugas khusus yang kehadirannya sangat penting dalam acara peradilan pidana anak di Indonesia yaitu Petugas Pembimbingan Kemasyarakatan. Salah satu yang menjadi tugas dari Pembimbingan Kemasyarakatan ini adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang mana hasil dari Penelitian Kemasyarakatan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa perkara anak. Pentingnya penelitian kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memasukkan diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara anak yang juga melibatkan peran serta BAPAS di dalam proses diversi tersebut selain Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.³ Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴ Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi tersebut.⁵

Pada waktu anak bersentuhan dengan dunia peradilan maka hal tersebut akan

1 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm.1.

2 Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

3 Edy Ikhsan, *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Medan : Pustaka Indonesia, 2014, hlm. 58.

4 Pasal 1 angka 7 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

5 Marjoko, *Penerapan Diversi Dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, Medan : Pusaka Indonesia, 2014, hlm. 24.

menjadi pengalaman pahit dan bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan karena pada dasarnya anak belum siap secara mental.⁶ Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia disebut diskresi.⁷

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sub sistem peradilan pidana bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan berperan kembali dalam keluarga dan lingkungan masyarakat luas secara sehat dan bertanggung jawab. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dan strategis dalam memberikan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak, sehingga perlu terus ditingkatkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan fungsi sistem pemasyarakatan.

Dalam proses penegakan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan berperan pada seluruh tahapan proses hukum, mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dengan meningkatnya pemahaman tentang profil, tugas dan peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan para calon Pembimbing Kemasyarakatan dapat menumbuhkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya

kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri.

Saat ini Pembimbing Kemasyarakatan telah masuk ke dalam rumpun Jabatan Fungsional. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pejabat fungsional diatur menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia baik yang ada di BAPAS, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) berjumlah 1.022 orang.⁸ Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Jabatan Fungsional harus mendapat perhatian khusus. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dan kompetensi. Selain itu, kedudukan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam struktur organisasi terutama di BAPAS perlu dipertegas, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa Pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Sebagai contoh, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama hanya dapat melakukan Litmas untuk tingkat 5 dan 6,

6 Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : UMM Prees, 2014, hlm. 28-29.

7 Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 2.

8 Trisapto Agung Nugroho, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69.

baik itu untuk Dewasa dan Anak. Begitu juga untuk Pembimbing Kemasyarakatan Muda melakukan Litmas untuk tingkat 3 dan 4, dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya untuk melakukan Litmas tingkat 1 dan 2. Sementara, untuk Pembimbing Kemasyarakatan Utama, tugas dan fungsinya melakukan evaluasi terhadap Hasil Litmas.

Dalam pelaksanaan tugas di BAPAS, Pembimbing Pemasyarakatan ditempatkan di seksi Bimbingan Klien Dewasa dan di seksi Bimbingan Klien Anak, sehingga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Akibatnya Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPAS. Penyelenggaraan Penelitian Kemasyarakatan di BAPAS yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan harus mengacu pada Perka BKN ini agar kesinambungan Pembimbing Kemasyarakatan dapat terpelihara karena penilaian kinerja didasarkan pada Perka BKN ini, sehingga secara struktur organisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan juga harus diperhatikan.

Revitalisasi Pemasyarakatan yang dilakukan saat ini antara lain: pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembinaan klien berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk itu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan agar dapat melakukan pendampingan, penelitian kemasyarakatan dengan baik sesuai dengan tujuan revitalisasi pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera melakukan revitalisasi. Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan

pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Revitalisasi meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembinaan klien, dan pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan.

Pembenahan dan optimalisasi serta penguatan penyelenggaraan Pemasyarakatan merupakan keniscayaan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan, penyelenggaraan pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis perlu diperhatikan. Optimalisasi pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi ujung tombak proses penelitian pemasyarakatan harus dilakukan. Hal ini dikarenakan pola pembinaan yang dilaksanakan pada warga binaan pemasyarakatan ditentukan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki peran besar dalam menjembatani transisi warga binaan ketika kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani kewajiban di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan harus didukung dengan kejelasan kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS, sehingga tidak ada keraguan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan. Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang maka akan diuraikan Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan menuju revitalisasi pemasyarakatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penelitian Kemasyarakatan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan menuju revitalisasi pemasyarakatan?

Tujuan

1. Untuk menganalisis Pengaturan Penelitian Kemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan menuju revitalisasi pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang diteliti, maka penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dalam pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang memiliki korelasi dengan Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, baik melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dengan menggunakan pendekatan metode ini dimaksudkan dapat menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan serta mengaitkannya dengan Struktur Balai Pemasyarakatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, dan Kepmenkeh RI NOMOR: M.02-PK.04.10 TAHUN 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/

Tahanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti, dan menganalisis dengan mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna.¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain.¹¹ Menurut Arikunto, sumber data dalam Penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹² Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan, kemudian selanjutnya dianalisis.

PEMBAHASAN

Pengaturan Penelitian Kemasyarakatan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan

Kegiatan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak terlepas dari Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagai sistem koreksional/perlakuan bertujuan untuk reintegrasi sosial guna mempersiapkan para pelanggar hukum untuk dapat pulih hidup, kehidupan dan penghidupannya sehingga dapat menjadi insan yang dapat hidup normal, tertib hukum, bertanggung jawab dan diterima oleh masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sistem pemasyarakatan terdiri dari fungsi perawatan, fungsi pembinaan, fungsi bimbingan serta fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Fungsi-fungsi yang diemban oleh pemasyarakatan tersebut dapat berjalan dengan baik

9 Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13-14.

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan Ke II, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm.145.

11 Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm.52.

12 Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.172.

apabila didasarkan oleh adanya penelitian kemasyarakatan yang dalam hal ini diperankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di Balai Pemasyarakatan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan menuntut peningkatan kualitas dari pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, secara khusus tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terdiri dari Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan. Penelitian kemasyarakatan merupakan acuan formal bagi aktivitas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan termasuk juga dalam upaya pembinaan dan pelayanan bagi tahanan. Sehingga penting untuk kita lebih memahami tentang hakekat penelitian kemasyarakatan dan mengapa penelitian kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pentingnya penelitian kemasyarakatan untuk dapat dipahami lebih baik dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilandasi oleh norma dan peraturan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan dijelaskan bahwa dalam proses penggolongan atau pengklasifikasian warga binaan dan tahanan diperlukan penelitian untuk mengetahui umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Hal ini seperti yang termuat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995: "Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan atas dasar a. Umur, b. Jenis Kelamin, c. Lama pidana yang djatuhkan. Jenis kejahatan; dan e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan"). Seluruh

jenis data dan informasi tersebut akan diperoleh secara lengkap dan objektif dari hasil penelitian.

Penggolongan atau klasifikasi dalam sistem pemasyarakatan selain untuk Narapidana berlaku juga untuk Tahanan, Klien Pemasyarakatan dan juga Anak yang berkonflik dengan hukum baik yang sedang menjalankan proses Diversi, penempatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam menjalankan fungsi perawatan, pembinaan, pembimbingan dan pengawasan, BAPAS memiliki peran yang sangat strategis karena dalam menjalankan fungsi tersebut banyak sekali kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan seperti kompetensi untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan Penelitian Kemasyarakatan itu sendiri sebagai bentuk *cek and balance* dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan sejatinya menjadi titik awal bagi perlakuan terhadap pelanggar hukum dalam fungsi pembimbingan, pendampingan dan pengawasan, karena dari hasil penelitian kemasyarakatan itulah terdapat informasi dan data penting yang dapat digunakan sebagai rekomendasi perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pentingnya Penelitian Kemasyarakatan untuk dipahami secara cermat dan holistik dilandasi aturan perundangan-undangan yang mengamanatkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk dapat menjadikan laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, sinergitas proses perlakuan terhadap pelanggar hukum diantara aparat penegak hukum dengan Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting, hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum semakin penting dan menjadi penentu aspek legalitas dari suatu putusan dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperkuat oleh norma yang menjelaskan bahwa peran pembimbing Kemasyarakatan sudah mulai dilakukan sejak proses pra-ajudikasi yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Katagori tindak pidana.
- b. Umur Anak.
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut semakin menguatkan bahwa pada tahap praajudikasi peran PK sudah sangat menentukan dalam upaya diversi pada tahap penyidikan. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa "Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan".

Dengan dasar ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran dalam menentukan dasar perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang ditangani oleh Penyidik dengan dasar hasil Penelitian Kemasyarakatannya. Sebagaimana norma yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) "Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengambilan kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan".

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap pra-ajudikasi khususnya dalam membuat penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan upaya diversi dan persidangan anak telah menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi Aparat Penegak Hukum yang sangat menentukan keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra-ajudikasi.

Pada tahap adjudikasi penelitian kemasyarakatan pun yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi dasar yang penting bagi hakim dalam memutus perkara anak, hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat (3) "Hakim Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara" dan pada ayat (4) "dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum". Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki dampak hukum yang sangat besar pengaruhnya untuk memastikan proses putusan hakim benar, batal demi hukum apabila penelitian kemasyarakatan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses hakim memutus perkara anak.

Pada tahap pos adjudikasi peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam proses membuat penelitian kemasyarakatan, karena dokumen penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menentukan rencana program pembinaan yang termasuk di dalamnya untuk menentukan program asimilasi dan program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dasar hukum yang menjelaskan tentang hal ini dapat di baca pada pasal 65 huruf "c" yang berbunyi Pembimbing Kemasyarakatan bertugas "menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya".

3. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Program pembinaan dan pembimbingan untuk Narapidana dan klien pemasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian didalamnya mencakup; ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja serta produksi.

Penelitian kemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan dalam pasal 1 ayat 3 "Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latarbelakang kehidupan warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS". Dari pengertian tersebut menunjukan bahwa Litmas merupakan dokumen yang

banyak mengandung informasi dan data penting dari pelanggar hukum yang sangat dibutuhkan untuk pembinaan, pembimbingan termasuk untuk keperluan lainnya.

Dalam melaksanakan program pembimbingan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan setelah melakukan Penelitian Kemasyarakatan hal ini sebagai bagian dari pengelolaan kasus atau manajemen kasus. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 pasal 33 dijelaskan bahwa "Pembimbing Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu: tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan". Berdasarkan pasal tersebut data penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan data penting yang menentukan pentahapan pembimbingan klien pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan yang akan dibina di luar Lapas dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan dasar hasil penelitian kemasyarakatan termasuk untuk keperluan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam kepentingan pemeriksaan dan hal ini sesuai dengan pasal 38 ayat 1 dan 2 "(1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak pidana dan Anak Negara yang akan dibina di luar Lapas dilaksanakan oleh BAPAS". dan "(2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak".

4. Kepmenkeh RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Asas yang dianut sistem Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, Narapidana, dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Dengan asas tersebut mendorong pemasyarakatan untuk mencari program pembinaan yang tepat bagi warga binaan pemasyarakatan, program yang tepat tersebut harus didasarkan kepada penilaian yang objektif terhadap warga binaan pemasyarakatan, dasar mendapatkan penilaian yang objektif tersebut dalam sistem pemasyarakatan dilakukan melalui proses penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Secara umum program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan melalui pendekatan pembinaan kepribadian (agama, pendidikan, mental dan sebagainya) serta program kemandirian yang meyakini warga binaan pemasyarakatan memiliki potensi produktif untuk meningkatkan kapasitas dirinya sebagai modal untuk penghidupannya dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi masyarakat. Kondisi ini akan mendorong keberhasilan warga binaan pemasyarakatan mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat

oleh Pembimbing Kemasyarakatan harus lebih baik sebagai dasar perlakuan perlakuan yang efektif untuk warga binaan pemasyarakatan, sehingga dalam pola pembinaan dijelaskan bahwa dalam menentukan program pembinaan wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaannya.

Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan juga lembaga lain yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan yang menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan menerima permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dari:

a. Pengadilan Negeri.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan hakim yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang di Pengadilan Negeri.

b. Lembaga Pemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Lapas yang akan dipergunakan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana, anak didik dan anak sipil dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Rumah Tahanan Negara.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Negara yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan.

d. Balai Bispas lain.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Balai Bispas daerah yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Balai Bispas yang bersangkutan.

e. Instansi lain.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian dan lain-lain yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian pelayanan sesuai keperluan dari instansi tersebut”.

Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pola pembinaan narapidana dan tahanan sangat diperlukan juga pada saat keikutsertaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Persidangan seperti;

- a. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas mengikuti sidang yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri maupun Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- b. Dalam sidang di Pengadilan Negeri, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penjelasan tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya.
- c. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penjelasan tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan program bimbingan narapidana.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sebagai Satuan Kerja Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

1. Kedudukan Hukum BAPAS Dalam Sistem Peradilan Pidana

BAPAS telah ada sejak masa penjajahan Belanda. BAPAS pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dikenal dengan *Jawatan Reklasering* pada tahun 1927 yang terletak di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1930-1935 berdasarkan Surat Keputusan No.11 yang mana *Jawatan Reklasering* dan Pendidikan Paksa dihapuskan, sedangkan tugas-tugasnya dilimpahkan kepada Kependidikan yang

selanjutnya disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa yang mana tugasnya: Menangani Lembaga-Lembaga Anak yang disebut Rumah Pendidikan Anak (RPN) dan Menangani Lepas Bersyarat, Pidana Bersyarat dan Pembinaan Lanjutan serta Anak yang dijatuhi hukuman oleh Hakim kembali ke Orang Tua. Masa penjajahan Jepang badan ini tetap ada dan tidak dihapuskan hanya saja tugasnya saja yang dikurangi, pada masa itu tugas pelaksanaan Lepas Bersyarat sudah tidak ada lagi.

Pada Masa Kemerdekaan Indonesia Sistem Kependidikan berubah dengan Sistem Pemasyarakatan (27 April 1964) dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/Kep/II/66, Struktur Organisasi berubah menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dua direktoratnya bertugas membina klien di dalam Lapas dan membina klien di luar Lapas yang mencakup Pembinaan Anak di dalam pemasyarakatan yang disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bispa maka Balai Bispa diganti dengan BAPAS dan di klasifikasikan menjadi dua yaitu BAPAS Klas I dan BAPAS Klas II berdasarkan lokasi, beban kerja dan wilayah kerja. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No.E.PK.04.10-23 tanggal 9 Maret, dapat diangkat Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari Lapas/Rutan/Cabang Rutan pada daerah yang tidak dapat dijangkau yang berfungsi melaksanakan tugas BAPAS.¹³

Kedudukan hukum dari BAPAS dalam peraturan perundangan Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 dirumuskan bahwa Balai

¹³ Saiful Azhar, *Peran Bapas Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Medan : Pusaka Indonesia, 2014, hlm. 24.

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 angka 9).

BAPAS memiliki beberapa pengertian dari beberapa peraturan yang saling berkaitan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.¹⁴ Sementara Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁵

Nama BAPAS sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa) yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi BAPAS untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Rumusan pasal-pasal tersebut di atas tentu saja belum memberikan kejelasan peran dari BAPAS. Penjabaran dari peran BAPAS tersebut dapat disimak pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian didalam tugasnya melakukan pembimnbingan terhadap klien pemasyarakatan.

2. Peran BAPAS Dalam Perlindungan Anak

Pentingnya suatu usaha dan upaya terhadap perlindungan anak memang sudah lama disadari. Berbagai cara dilakukan untuk dapat mewujudkan usaha perlindungan tersebut, termasuk dengan hadirnya BAPAS dalam ruang lingkup anak sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada anak, karena BAPAS sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintah.

Perlindungan kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang atau masyarakat termasuk juga negara sebagai organisasi tertinggi dari masyarakat dan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan negara tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana (negara sebagai fasilitator) sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak dengan cara berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kegiatan perlindungan anak yang diberikan tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri,

14 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan.

15 Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁶

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum memang menjadi objek dari keberadaan hukum pidana, akan tetapi terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak sebagai subjek hukum (Pasal 4 Ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik).¹⁷

Dunia hukum mengalami perubahan cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan

mekanisme sistem peradilan pidana anak yang bersifat represif karena sistem tersebut dianggap gagal memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Secara kejiwaan masa anak-anak adalah periode yang rentan yang membuat anak menjadi belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh serta kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Keadaan psikologi anak masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Kondisi demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan oleh anak sendiri, karena anak bukan pelaku murni, melainkan juga dapat dipandang sebagai korban.

Anak seharusnya tidak dihadapkan pada sistem peradilan jika ada cara yang lebih tidak menekan untuk menangani perbuatan yang melawan hukum, maka dari itu dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Kehadiran UU SPPA sekaligus memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa Lembaga Negara yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 40-41.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 204-205

Sistem peradilan pidana yang diatur dalam UU SPPA, telah memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidananya, meskipun proses peradilan pidana yang harus dilalui jalurnya sama yaitu Polisi, Jaksa, Peradilan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun yang berbeda adalah terlihat pada perlakuan yang diberikan pada umumnya oleh aparat dalam setiap jenjang sistem peradilan pidana, misalnya adanya polisi khusus yang khusus menangani perkara anak dan polisi khusus yang dimaksud disini adalah Penyidik Polri yang terpilih dan memiliki dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik Polri yang dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan (Pasal 26 Ayat (2) UU SPPA), demikian juga yang berlaku pada Jaksa Khusus Anak, Hakim Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.¹⁸

Dicantumkannya konsep diversi sebagai bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukan, seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversi merupakan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana.¹⁹

Diversi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan sama

sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal (luar pengadilan) dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.²⁰

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi:

- a. Non Diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pembimbingan Kemasyarakatan sebelum menjadi jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS

18 Ibid, hlm. 211-212.

19 Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, 2010, hlm. 11.

20 Ibid, hlm. 14-15.

dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pada Pasal 55, 56 dan 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Pada Pasal 57 (1) diatur kewajiban hakim untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampai-

kan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum sidang dibuka. Pada Pasal 60 (3) mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak proses penyidikan. Dalam Pasal 27 (1) penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran pembimbingan kemasyarakatan.

3. Pertimbangan dan Saran Pembimbing Kemasyarakatan

Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) yang berisi:

- a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
- d. Hal lain yang dianggap perlu.
- e. Berita acara Diversi.
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 60 ayat 3 hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi pidana (Pasal 71) atau mengambil tindakan (Pasal 82). Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum

dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan anatara lain penjatuan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Seyogyanya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-undang dan pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternatif pengganti keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak yang sesuai dengan sistem sosial Indonesia yaitu kerabat keluarga besarnya.

Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat eksekusi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan hakim. Hal ini tidak sertamertadiartikansebagai perpindahan tempat menginap para narapidana, melainkan Lembaga Pemasyarakatan mengemban tugas untuk menyadarkan para narapidana agar bisa kembali pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan seharusnya diisi oleh para punggawa yang berkompeten seutuhnya,

agar mampu melakukan pembinaan moral dan mental para narapidana. Setidaknya untuk memberikan pemahaman kepada narapidana agar tidak mengulang perbuatan pidananya lagi.

Lapas harus mampu membuat seseorang 'menerima keadaan' secara mental bahwa dirinya adalah seorang narapidana. Walaupun narapidana datang dengan serangkaian proses pidana yang mereka lewati tanpa melibatkan personel lapas, namun lapas harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan melalui para petugas pemasyarakatan. Petugas lapas harus dapat memahami kondisi mental atau moril para narapidana pasca vonis hakim pengadilan.

Saat seseorang narapidana pertama kali menginjakkan kakinya di lapas, maka petugas sudah harus dapat membuat pemindaian tentang kondisi narapidana secara psikologis, dalam kebutuhannya untuk memberikan model pembinaan yang tepat bagi mereka. Dalam agenda revitalisasi pemasyarakatan, klasifikasi dilakukan dari *super maximum* hingga *minimum security*. Namun diharapkan sebelum diterapkan klasifikasi tentang 'tingkat bahaya' pada perilaku narapidana, dilakukan juga klasifikasi berdasarkan hal-hal mendasar seperti: umur, latar belakang sosial, kondisi mental/kejiwaan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan pembinaan berdasarkan klasifikasi tersebut. Sehingga narapidana lansia tidak harus melakukan kegiatan yang sama seperti mereka yang belia. Demikian halnya mereka yang jiwanya labil dalam masa tumbuh kembang remaja, materi rohani tidak disampaikan dengan cara yang sama seperti penyampaian kepada mereka yang sudah lebih berpengalaman dengan masalah duniawi.

Pemasyarakatan akan mempercepat berbenah menjadi yang lebih baik. Kondisi lapas yang penuh sesak tidak bisa diselesaikan hanya dengan pasrah dan menyalahkan kondisi ekonomi dan sosial yang menjadi

salah satu penyebab peningkatan kejahatan. Lembaga pemasyarakatan harus punya langkah futurologis dan antisipatif, untuk mewujudkan tugas mulia, mengembalikan hakikat manusia menjadi sadar dan taat hukum, dengan mengembangkan kompetensi internal lembaga pemasyarakatan, menuju lembaga pemasyarakatan yang bersih dan bertanggung jawab.

Revitalisasi Pemasyarakatan memberikan pembekalan kepada Petugas Pemasyarakatan agar dapat memberikan pembekalan mental kepada narapidana. Petugas pemasyarakatan seharusnya bukan sekedar pegawai kantor yang mengurus administratif saja. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsinya. Seperti Petugas di Penjaga Pintu Utama (P2U), Petugas Keamanan Lapas, Petugas Registrasi, Petugas Pembinaan, dan petugas lainnya yang ada di Lapas. Harus dilakukan pembekalan dalam penanganan warga binaan yang ada di dalam Lapas. Selain itu juga memiliki moral dan mental yang baik, sehingga dapat melakukan pembinaan moral dan mental yang baik pula kepada para narapidana.

Selain Petugas Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, Satuan Kerja Pemasyarakatan memiliki Pembimbing Pemasyarakatan yang dapat mendukung revitalisasi Pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan menjadi ujung tombak terhadap proses penelitian pemasyarakatan di BAPAS karena pola pembinaan yang dilakukan pada warga binaan pemasyarakatan ditentukan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga memiliki peran besar dalam menjembatani transisi warga binaan ketika kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani kewajiban di lembaga pemasyarakatan.

Tentunya tidak mudah untuk

melaksanakan pembinaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam merevitalisasi pemasyarakatan salah satunya dengan meningkatkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan warga binaan pemasyarakatan. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan mutlak harus dilakukan, baik secara struktur maupun secara substansi. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pejabat fungsional telah diatur menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Instansi pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam Pembinaan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan harus diperhatikan tingkat kemampuan Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan, karena kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan sangat mempengaruhi pembinaan penghuni lapas dan rutan serta pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu Instansi Pembina Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Saat ini Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki 3 (tiga) kedudukan, yaitu²¹:

1. Aparat Penegak Hukum

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam setiap proses tahapan peradilan pidana anak. Kedudukannya sejajar dengan

21 Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 349.

aparatus penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

2. Petugas Pemasyarakatan

Sebagai petugas pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membimbing warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

3. Pejabat Fungsional

Sebagai pejabat fungsional, Pembimbing Pemasyarakatan harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kompetensi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Di dalam Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan secara detail telah diatur tentang unsur kegiatan tugas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun unsur kegiatan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan terdiri atas pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengembangan profesi.²² Kemudian jika dilihat secara detail di dalam unsur Bimbingan Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan; dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Dalam melakukan pembimbingan kemasyarakatan uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yang

dilakukan antara lain meliputi: melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana. Untuk tingkat Jabatan Pembimbingan Kemasyarakatan yaitu tingkat Jabatan Pertama sampai Madya dalam melakukan fungsinya dapat melakukan penelitian kemasyarakatan untuk anak maupun dewasa.²³

Penyelenggaraan Penelitian Kemasyarakatan di BAPAS yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Kepala BKN dari tingkat kesulitan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Seperti Pembimbing Kemasyarakatan Pertama hanya dapat melakukan Litmas untuk tingkat 5 dan 6, baik itu untuk dewasa dan anak. Begitu juga untuk Pembimbing Kemasyarakatan Muda melakukan Litmas untuk tingkat 3 dan 4, dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya untuk melakukan Litmas tingkat 1 dan 2. Sementara, untuk Pembimbing Kemasyarakatan Utama tugas dan fungsinya untuk melakukan evaluasi terhadap Hasil Litmas.

Tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan tentunya berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPAS. Jika dilihat struktur organisasi BAPAS terdiri dari Kepala BAPAS, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Seksi Bimbingan Klien Anak. BAPAS yang sebelumnya bernama Bispa memiliki struktur organisasi yang sama. Sebelum Pembimbing Kemasyarakatan masuk ke dalam rumpun jabatan fungsional, jelas pembagian kerja di BAPAS sesuai dengan Seksi yang ada yaitu Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Seksi Bimbingan Klien Anak. Dimana Pembimbingan dilakukan oleh

²² Republik Indonesia, *Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*, hlm.6.

²³ Republik Indonesia, *Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*, hlm. 7-17.

Pegawai yang berada di masing-masing seksi. Misalnya Pegawai yang ada pada Seksi Bimbingan Klien Dewasa melakukan pembimbingan untuk Klien Dewasa, dan pegawai yang ada pada Seksi Bimbingan Klien Anak melakukan pembimbingan untuk Klien Anak.

Namun, saat ini dengan adanya Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan perlu diperjelas kedudukan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada Struktur Organisasi di BAPAS. Saat ini penempatan Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS secara struktur masih ditempatkan pada Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Seksi Bimbingan Klien Anak. Sehingga pembagian kerja ataupun pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Klien yang ada. Pembimbing Kemasyarakatan yang berada pada koordinasi Seksi Bimbingan Klien Dewasa hanya melakukan pembimbingan bagi Klien dewasa sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan yang di bawah koordinasi Seksi Bimbingan Klien Anak melakukan pembimbingan bagi Klien Anak. Sehingga secara beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tingkat pangkat dan golongan yang lebih tinggi belum tentu mendapatkan beban kerja yang sesuai dengan jenjang jabatannya.

Selain itu, penempatan Pembimbing Kemasyarakatan di bawah koordinasi Seksi Bimbingan Klien Dewasa atau Seksi Bimbingan Klien Anak masih berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPAS. Sehingga terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang mendapat Pembimbingan yang banyak ada Pembimbing Kemasyarakatan yang sedikit mendapat pembimbingan yang sedikit. Struktur Kepmenkeh RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 dan perbaikan Kepmenkeh RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1997 belum mengakomodir garis tugas untuk Pembimbing Kemasyarakatan sehingga perlu penegasan garis tugas pada struktur. Pada

Kepmen ini BAPAS memiliki 2 kategori, yaitu BAPAS Kelas I dan BAPAS Kelas II. BAPAS Kelas I berkedudukan di Ibukota Provinsi, sementara BAPAS Kelas II berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota Madya. BAPAS Kelas I dengan eselonering 3 sedangkan BAPAS Kelas II eselonering 4. Kedudukan BAPAS dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan Pembimbingan Kemasyarakatan di pelosok tanah air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 105 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya undang-undang ini: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun BAPAS di kabupaten/kota. Kemudian dijelaskan pula bahwa Ketentuan mengenai pembentukan kantor BAPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

Jika kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan. Namun, hingga saat ini sudah lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun perintah undang-undang ini untuk membangun BAPAS di kabupaten/kota belum terealisasi, sehingga pelayanan BAPAS yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan belum maksimal menyentuh masyarakat pelosok.

Berdasarkan Kepmenkeh RI Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Pasal 28 disebutkan jumlah Balai BISPA di lingkungan Departemen Kehakiman (Sekarang Kementerian Hukum dan HAM)

sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan perincian Kelas I 13 (tiga belas) dan Kelas II 28 (delapan belas). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 jumlahnya berubah menjadi 44, Kelas I 14 (empat belas) dan Kelas II 30 (tiga puluh). Sehingga dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan yang berkaitan dengan kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan perlu direalisasikan pembangunan BAPAS di kabupaten/kota.

Lebih jauh Kepmen Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 menyebutkan bahwa Balai BISPA Kelas I (BAPAS Kelas I) terdiri-dari Kepala Satker Eselon III dan 3 Jabatan Struktural Eselon IV

yang terdiri dari 2 teknis dan 1 administrasi fasilitatif. Kemudian masing-masing Eselon IV memiliki 3 Eselon V. Sesuai perkembangan teknologi dan informasi yaitu berdasarkan Instruksi Presiden bahwa Jabatan Eselon III, IV, dan V ditiadakan maka BAPAS Kelas I sebagai Satuan Kerja dapat segera beradaptasi untuk melakukan penyesuaian. Hal ini perlu dilakukan untuk penyederhanaan struktur untuk mempercepat pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Sehingga pada BAPAS Kelas I hanya terdiri 4 kotak jabatan struktural (Kepala BAPAS Kelas I, Subag TU, Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Seksi Bimbingan Klien Anak) dan 1 kotak Jabatan Fungsional. Seperti terlihat pada gambar 1. berikut:

Gambar.1
Struktur Organisasi BAPAS Kelas I

Begitu juga untuk Balai BISPA Klas II (BAPAS Kelas II) terdiri-dari Kepala Satker Eselon IV dan 3 Jabatan Struktural Eselon V yang terdiri-atas 2 teknis dan 1 administratif. Kemudian masing-masing Eselon IV memiliki 3 Eselon V. Sesuai perkembangan teknologi dan informasi yaitu berdasarkan instruksi Presiden bahwa Jabatan Eselon III, IV, dan V ditiadakan maka BAPAS sebagai Satuan Kerja dapat segera beradaptasi untuk melakukan penyesuaian. Sehingga pada

BAPAS hanya terdiri 4 kotak jabatan struktural (Kepala BAPAS Kelas II, Urusan TU, Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Sub Seksi Bimbingan Klien Anak) dan 1 kotak Jabatan Fungsional. Seperti terlihat pada gambar.2 berikut:

Gambar.2
Struktur Organisasi BAPAS Kelas II

Kemudian Perubahan Nomenklatur BISPA menjadi BAPAS terdapat pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Kepmen Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Pada konsideran menetapkan PERTAMA mengubah nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang diatur dalam Kepmen Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini yaitu BAPAS.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan berkaitan fungsi penelitian kemasyarakatan dan tugas pembimbing kemasyarakatan telah diatur pada Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fungsi Penelitian Kemasyarakatan untuk menentukan program pentahapan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu Penelitian Kemasyarakatan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga penyidik serta penuntut

dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk keperluan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik untuk kepentingan peradilan maupun untuk kepentingan penanganan di luar proses peradilan.

Penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting untuk menentukan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan termasuk juga untuk kepentingan aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik, penuntut, dan hakim. Pembimbing Kemasyarakatan yang saat ini merupakan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus seperti pembinaan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, kedudukan dalam struktur organisasi, kompetensi, dan objektivitas pemberian tugas dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan. Kelengkapan BAPAS pada Kementerian Hukum dan HAM di Kabupaten/Kota sangat mendukung pelaksanaan tugas hingga sampai ke pelosok tanah air.

Saran

1. Kementerian Hukum dan HAM seyogianya perlu merevisi Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Kepmen Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan melengkapi struktur BAPAS Kelas I dan BAPAS Kelas II dengan menempatkan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada struktur organisasi BAPAS serta menyederhanakan struktur organisasi.
2. Perlu melaksanakan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk membangun BAPAS di kabupaten/kota dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya undang-undang ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada rekan-rekan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan dan kepada Edward James Sinaga dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang Pembimbing Kemasyarakatan dan Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edy Ikhsan, *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Medan: Pustaka Indonesia, 2014.
- Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : UMM Prees, 2014.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Marjoko, *Penerapan Diversi Dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, Medan : Pusaka Indonesia, 2014.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, 2010.

SaifulAzhar, *Peran Bapas Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Medan : Pusaka Indonesia, 2014.

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Jurnal/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian:

Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019).

Trisapto Agung Nugroho, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019).

Peraturan:

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.*

Republik Indonesia, *Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.*

Republik Indonesia, *Kepmenkeh RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan.*

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.*

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.*